

EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS BERBASIS NETWORK GOVERNANCE

Received : 30-04-2026 Revised : 15-05-2026 Accepted : 03-06-2026

Sasccanassa Arista¹, Siti Badiah², Luthfi Salim³, Muslimin⁴

^{1,2,3,4}Departemen Sosiologi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

sasccanassaarista@gmail.com¹

ABSTRAK

Program Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat di Provinsi Lampung sebagai model *network governance* berbasis kearifan lokal untuk mengoprasionalkan penyandang disabilitas, namun pada pengoprasionalan pelayanan sosial masih jauh dari kata sejahtera. Penelitian bertujuan untuk mengetahui evaluasi efektifitas kebijakan pelayanan sosial disabilitas berbasis *network governance*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis melalui teknik wawancara dengan pejabat dinas sosial, aparatur lapangan lintas sektor, dan disabilitas beserta keluarga yang menerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskoneksi struktural antara idealisme regulasi makro dan realitas operasional di lapangan. Meskipun program ini berhasil memobilisasi tata kelola *network governance* yang melibatkan 18 fasilitator untuk menjangkau 100 penerima manfaat, sistem keberlanjutannya lumpuh akibat pemangkasan anggaran lokus daerah secara drastis dari 15 kabupaten menjadi hanya 4 kabupaten pada tahun 2026. Yansos Jejama mengalami reduksi fungsional karena terjebak pada pendekatan medis-karitatif jangka pendek seperti pembagian sembako, obat-obatan, dan alat bantu. Kesimpulan penelitian bantuan material musiman gagal membangun kapasitas kemandirian ekonomi, melainkan membuat stigma kelompok disabilitas sebagai objek santunan. Pasca-kunjungan tim, penyandang disabilitas masih berhadapan dengan stigma struktural, pengucilan sosial, dan diskriminasi fisik di tengah masyarakat. Studi ini berkontribusi mendekonstruksi klaim keberhasilan administratif sepihak, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas tata kelola pelayanan publik harus menyentuh dekonstruksi stigma kultural pada tingkat mikro-interaksional masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Yansos Jejama, Kesejahteraan Sosial, Penyandang Disabilitas, Lampung Timur, *Network Governance*.

ABSTRACT

The Community Network Social Services Program in Lampung Province is a network governance model based on local wisdom to operationalize people with disabilities, but the operationalization of social services is still far from being prosperous. The research aims to evaluate the effectiveness of network governance-based disability social service policies. The method used is qualitative with a sociological approach through interview techniques with social service officials, cross-sector field officials, and people with disabilities and families who receive benefits. The research results show that there is a structural disconnect between the idealism of macro regulation and the operational reality on the ground. Even though this program was successful in mobilizing network governance involving 18 facilitators to reach 100 beneficiaries, its sustainability system was paralyzed due to drastic regional budget cuts from 15 districts to only 4 districts in 2026. Yansos Jejama experienced a functional reduction because it was trapped in a short-term medical-charitative approach such as distributing basic necessities, medicines and assistive devices. The research conclusion is that seasonal material assistance fails to build the capacity for economic independence, but instead stigmatizes disability groups as objects of compensation. After the team's visit, people with disabilities still faced structural stigma, social exclusion and physical discrimination in society. This study contributes to deconstructing unilateral claims of administrative success, while emphasizing that the effectiveness of public service governance must touch on the deconstruction of cultural stigma at the micro-interactional level of society.

Keywords: Policy Evaluation, Yansos Jejama, Social Welfare, Persons with Disabilities, East Lampung, *Network Governance*.

^{2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, badiah@radenintan.ac.id, luthfisalaim@radenintan.ac.id, muslimin@radenintan.ac.id

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak dan kesejahteraan sosial (*social welfare*) bagi penyandang disabilitas telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan tindakan pemberian bantuan atau pelayanan yang didasarkan pada rasa belas kasihan dan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan orang lain secara langsung menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia karna karena pendekatan berbasis hak asasi manusia ini memandang penyandang disabilitas bukan lagi sebagai objek santunan atau penerima belas kasihan, melainkan sebagai subjek hukum penuh yang memiliki hak setara untuk berpartisipasi aktif dalam semua aspek kehidupan, pergeseran ini menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak mereka bukanlah bentuk kebaikan hati atau kedermawanan, melainkan kewajiban negara dan masyarakat yang harus dipenuhi demi mewujudkan keadilan sosial, kemandirian, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan yang melekat pada setiap individu (Herbowo, 2025).

Pendekatan tindakan pemberian bantuan atau pelayanan yang didasarkan pada rasa belas kasihan dan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan orang lain secara langsung mengalami dampak pemenuhan hak disabilitas yang kerap mengalami hambatan secara struktural dan kultural di tingkat lokal, di mana penyandang disabilitas masih terjebak dalam stigma yang kurang baik, eksklusi sosial masyarakat rentan, hingga kerentanan terhadap tindak kekerasan (Merakati *et al*, 2025).

Provinsi Lampung pada tahun (2025) mengalami tingkat tindakan kekerasan penyandang disabilitas mencapai 4,58% dilakukan tindakan kekerasan berupa kekerasan fisik (*Physical Abuse*), kekerasan seksual (*Sexual Abuse*), kekerasan psikis / emosional (*Psychological Abuse*) dan penelantaran dan kekerasan ekonomi (*Neglect & Economic Abuse*) dari total penduduk. Kerentanan sosial kelompok disabilitas diperberat oleh data empiris di mana kasus kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus masih tinggi, yakni mencapai 15%–20% dari total kasus kekerasan anak akibat kendala komunikasi dan ketakutan korban untuk melapor (Arjuna, Dedi & Bin, 2025)

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada kelompok disabilitas, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang kemudian dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui pengesahan program inovatif bernama Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) sejak tahun 2023. Secara filosofis, kata “*Jejama*” (Bahasa Lampung: Bersama-sama) merepresentasikan nilai kearifan lokal gotong royong yang ditransformasikan ke dalam tata kelola pemerintahan publik. Program ini didesain sebagai sebuah ekosistem *collaborative governance* yang mengintegrasikan peran lintas sektoral seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pekerja Sosial, hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk melakukan intervensi langsung (*active outreach*) (Edy & Alfyan, 2022). Nilai-nilai inklusi dan kesetaraan manusia tanpa diskriminasi ini juga sejalan dengan perspektif teologis-sosiologis, seperti yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 61 mengenai kesetaraan hak bagi kelompok rentan dalam interaksi sosial masyarakat (Irfan & Khulqi, 2024).

Efektivitas model kebijakan berbasis jejaring (*network governance*) sering kali dihadapkan pada masalah

keberlanjutan (*sustainability*) dan fluktuasi komitmen institusional (Novita, 2025). Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung (Ibu Lusi), ditemukan paradoks implementasi yang signifikan. Sejak diinisiasi pada tahun 2023, program Yansos Jejama awalnya mampu menjangkau 15 kabupaten/kota. Namun, pada tahun 2024 cakupan intervensi menyusut drastis menjadi hanya 6 kabupaten. Memasuki tahun 2025, alokasi anggaran program semakin terkontraksi dan hanya menysasar 4 wilayah (Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Utara, dan Pringsewu), bahkan alokasi dana untuk Kabupaten Pringsewu belum dapat terealisasi. Di lapangan, intervensi tim gabungan memang berjalan dengan aspek klinis-sosial seperti pelibatan dokter, psikolog, dan LKS untuk asesmen derajat kestabilan disabilitas serta distribusi logistik medis, namun tren penurunan cakupan wilayah ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan kelemahan dalam anggaran keuangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah penting yang belum pernah diteliti sebelumnya. Selama ini, penelitian tentang pelayanan disabilitas hanya fokus menghitung angka laporan administrasi atau melihat bantuan fisik secara terpisah. Masih sangat jarang ada penelitian yang melihat bagaimana kestabilan anggaran dan pemotongan program berdampak pada kerja jaringan sosial di daerah. Keunikan penelitian ini adalah fokus pada seberapa tanggap dan inklusif kebijakan yang ada. Penelitian ini ingin menguji apakah jaringan sosial berbasis kearifan lokal (Jejama) benar-benar mampu mengatasi hambatan birokrasi, atau justru hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak jangka panjang

Riset mengenai evaluasi pelayanan bagi penyandang disabilitas sejauh ini didominasi oleh pendekatan administratif-kuantitatif yang berfokus pada pemenuhan indikator formal birokrasi seperti penelitian yang dilakukan (Suryono & Handayani, 2022), yang meletakkan tolok ukur keberhasilan kebijakan sekadar pada tingkat penyerapan anggaran dan jumlah regulasi daerah yang disahkan. Selain itu, kajian dalam Policy & Governance Review (Pratama, 2021) menunjukkan bahwa evaluasi terhadap efektivitas bantuan materiil seperti pembagian alat bantu atau stimulan modal usaha cenderung dilakukan secara parsial dan terfragmentasi pada sektor tertentu, sehingga mengabaikan kebutuhan non-materiil seperti pemulihan psikologis korban kekerasan dan akses komunikasi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kritik serupa juga sering muncul dalam jurnal internasional Disability & Society (Oliver & Barnes, 2020) yang menegaskan bahwa pendekatan pelayanan yang kaku dan mekanis sering kali gagal menyentuh akar masalah diskriminasi struktural di tingkat lokal.

Terdapat kelangkaan studi yang secara spesifik menggunakan pendekatan sosiologis-organisasional untuk membedah interaksi antara kebijakan publik dan kapasitas kelembagaan lokal. Meskipun artikel di Masyarakat: Jurnal Sosiologi (Rahmawati, 2023) telah mengulas pentingnya modal sosial dalam pemberdayaan kelompok rentan, namun pengaruh dari faktor makro-organisasi seperti fluktuasi anggaran daerah serta penyusutan lokus program akibat keterbatasan ruang fiskal belum dikaitkan secara empiris dengan menurunnya performa instrumen jejaring sosial di tingkat akar rumput. Publikasi dalam Sosio Konsepsia (Hidayat, 2022) juga mengonfirmasi bahwa ketidakstabilan pasokan sumber daya dari

pemerintah pusat maupun daerah secara otomatis memperlemah daya gerak aktor-aktor sosial lokal yang berhadapan langsung dengan pemenuhan hak disabilitas di lapangan.

Melalui celah kosong tersebut, penelitian ini dilakukan dengan kebaruan analisis evaluatif yang bertumpu pada dimensi responsivitas dan inklusivitas kebijakan. Dengan mengacu pada karakteristik lokal di wilayah Lampung, sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kurniawan & Saputra, 2024) mengenai rapuhnya tata kelola birokrasi daerah, riset ini diarahkan untuk menguji peran jejaring berbasis kearifan lokal (*Jejama*), sejalan dengan konseptualisasi penguatan nilai lokal yang pernah diulas dalam Jurnal Sosiologi Universitas Lampung (Wahyudi, 2023), penelitian ini memosisikan *Jejama* sebagai objek uji strategis guna melihat apakah model kelembagaan berbasis nilai lokal tersebut mampu memitigasi hambatan struktural birokrasi, atau justru terjebak menjadi seremonial birokrasi belaka yang kehilangan dampak keberlanjutannya (*sustainable impact*).

Kabupaten Lampung Timur dipilih sebagai lokus penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu dari sedikit daerah yang bertahan dalam skema alokasi anggaran kritis tahun 2025, sehingga menjadi representasi krusial untuk menguji daya tahan dan efektivitas program. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap Kebijakan Program Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos *Jejama*) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Timur, sekaligus merumuskan model rekomendasi tata kelola jejaring yang adaptif dan inklusif.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas kebijakan pelayanan sosial disabilitas berbasis *network governance* dibentuk melalui interaksi antara birokrasi pemerintahan daerah, tim gabungan fasilitator lintas sektor, dan penyandang disabilitas di Desa Labuhan Ratu. Penelitian ini memandangkan kelompok disabilitas dan keluarganya bukan sekadar objek medis yang pasif, melainkan sebagai aktor sosial aktif yang mengonstruksikan makna kesejahteraan dan martabat di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah serta jeratan stigma kultural lokal. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami proses evaluasi kebijakan Yansos *Jejama* bukan hanya dari capaian administratif-logistik semata, melainkan sebagai praktik sosial yang dinamis, performatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian utama. Pertama, bagaimana efektivitas dan responsivitas tata kelola jejaring lintas sektor (*network governance*) Program Yansos *Jejama* dibangun dan dioperasionalkan di tengah tekanan kontraksi anggaran daerah yang ekstrem dan yang kedua, bagaimana interaksi tatap muka antara tim pelaksana program sebagai representasi struktur makro dengan penyandang disabilitas sebagai agen mikro menghasilkan konstruksi makna pelayanan sosial baru, serta sejauh mana interaksi tersebut mampu mendekonstruksi tembok tebal stigma dan pengucilan sosial di tengah masyarakat lokal. Perumusan pertanyaan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontradiksi antara klaim keberhasilan administratif sepihak (*overclaim*) birokrasi dengan realitas inklusi semu (*pseudo-inclusion*) yang dialami

kelompok disabilitas pada tingkat interaksional masyarakat.

METODE PENELITIAN

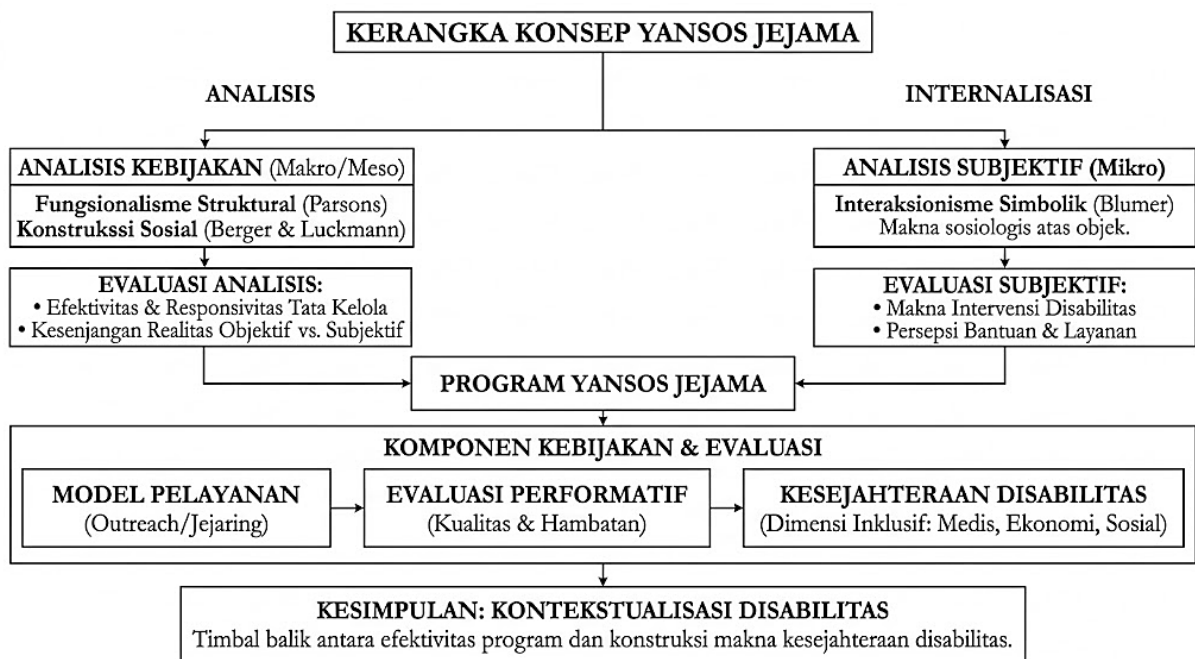
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis yang diintegrasikan secara spesifik melalui fenomena evaluasi kebijakan publik. Untuk menghindari tumpang tindih epistemologis, paradigma utama yang digunakan adalah Konstruksi Sosial (Peter L. Berger dan Thomas Luckmann) sebagai kerangka makro untuk membedah bagaimana kebijakan Yansos Jejama diproduksi oleh pemerintah dan diinternalisasi oleh masyarakat. Kerangka makro tersebut diturunkan ke tingkat mikro menggunakan teori Interaksionisme Simbolik (Herbert Blumer) untuk menganalisis bagaimana makna pelayanan sosial dikonstruksikan melalui interaksi tatap muka antara pelaksana program dan penyandang disabilitas di lapangan (Radianto *et al*, 2025).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, pemilihan didasarkan karena wilayah ini merupakan salah satu dari sedikit daerah yang bertahan dalam skema alokasi anggaran kritis tahun 2025, sehingga menjadi representasi krusial untuk menguji daya tahan dan efektivitas program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur agar jalannya interaksi tetap terarah pada panduan wawancara (Nurhayati *et al*, 2024). Jenis pertanyaan berkisar pada pengalaman menerima program dan perbedaan kesejahteraan sebelum dan sesudah program. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan durasi berkisar antara 45 hingga 75 menit per sesi. Seluruh proses wawancara direkam menggunakan alat perekam digital atas persetujuan informan (*informed consent*). Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu, kemudian peneliti melakukan transkrip verbal, wawancara terhadap informan dilakukan terhadap 18 informan yang terdiri dari kepada pejabat struktural pengambil kebijakan tingkat provinsi yakni (1) Ibu Lusita, S.E selaku Seka Rehabilitasi Sosial, (2) kepala desa Labuhan Ratu Lampung Timur yakni bapak Al-Amin, (3) Anggota dinas sosial Provinsi Lampung yang terdiri dari 1 orang ahli gizi, 1 orang dokter, 1 orang perawat dan 7 orang relawan sosial khusus dan relawan sosial masyarakat, (4) 6 orang penyandang disabilitas fisik/sensorik dan anggota keluarga inti yang mengasuh mereka di Desa Labuhan Ratu yang menerima langsung pelayanan.

Selain wawancara peneliti melakukan observasi menggunakan metode observasi nonpartisipan. Peneliti meposisi diri sebagai pengamat luar yang tidak mengintervensi aktivitas harian subjek (Nurhayati *et al*, 2024). Fokus observasi diarahkan pada interaksi tim gabungan (Dinas Sosial Provinsi Lampung seperti Dokter, Pekerja Sosial Masyarakat, Penerima dan Manfaat/ Penyandang Disabilitas) melakukan penelitian lapangan, proses distribusi obat dan vitamin, edukasi kesehatan keluarga disabilitas dan pemberian alat bantu seperti tongkat netra, kursi roda, alat bantu dengar, sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur. Hasil pengamatan dicatat secara kronologis dalam buku catatan lapangan (*field notes*). Analisis data dilakukan mengikuti tahap analisis fenomenologis sebagaimana

dikemukakan oleh Creswell (2017) Tahap pertama dilakukan dengan mentranskrip secara verbatim seluruh hasil wawancara dan catatan lapangan. Selanjutnya, peneliti melakukan pembacaan berulang terhadap transkrip untuk mengidentifikasi pernyataan-pernyataan signifikan yang berkaitan dengan evaluasi efektifitas kebijakan pelayanan sosial disabilitas. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema esensial yang merepresentasikan makna pengalaman informan. Tahap akhir dilakukan dengan menyusun deskripsi tekstural dan struktural untuk menafsirkan esensi pengalaman penyandang disabilitas dan keluarga di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dinas sosial, aparatur lintas sektor lapangan di masyarakat, serta disabilitas dan keluarga yang menerima manfaat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga interpretasi temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

KERANGKA TEORI/KONSEP



Gambar 1

Kerangka Teori

1. Integrasi Evaluasi Kebijakan dan Perspektif Sosiologis

Evaluasi kebijakan bukan sekadar instrumen administratif-retoris untuk menilai kesesuaian antara *input* dan *output* (Dunn, 2018). Dalam lanskap sosiologi kebijakan, evaluasi merupakan proses dinamis untuk membedah bagaimana sebuah intervensi struktural pemerintah dialami, dimaknai, dan ditransformasikan oleh relawan di akar rumput (Nugroho, 2021). Untuk mengevaluasi program Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) di Kabupaten Lampung Timur, penelitian ini menolak penggunaan teori

secara terpisah-pisah yang dapat memicu fragmentasi metodologis. Sebaliknya, penelitian ini mengonstruksikan sebuah Sintesis Teoretis Integratif yang menjembatani level makro-struktural dan mikro-interaksional melalui empat pilar konseptual.

Evaluasi Kebijakan & Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, masyarakat dipandang sebagai sistem seimbang yang membutuhkan subsistem adaptif untuk mempertahankan integrasi sosial (Ritzer, 2019). Program Yansos Jejama dievaluasi sebagai subsistem kebijakan yang berfungsi melakukan *social maintenance* terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Evaluasi kebijakan di level ini diarahkan untuk mengukur dimensi efektivitas dan responsivitas tata kelola jejaring lintas sektor (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan LKS) dalam menjangkau wilayah periferi yang mengalami defisit aksesibilitas layanan perkotaan.

Konstruksi Sosial

Teori Konstruksi Sosial oleh Peter L. Berger & Thomas Luckmann digunakan untuk membedah bagaimana program Yansos Jejama melewati fase *eksternalisasi* (perumusan kebijakan oleh inovasi daerah Provinsi Lampung), *objektifikasi* (institusionalisasi program di lapangan dalam wujud operasional "jemput bola"), dan *internalisasi* (penerimaan program oleh subjek). Melalui fase ini, peneliti mengevaluasi kesenjangan antara realitas objektif kebijakan (anggaran dan regulasi Perda No. 7/2021) dengan realitas subjektif yang terbentuk di lapangan.

Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer digunakan sebagai pisau analisis akhir untuk membedah level mikro. Pendekatan ini menegaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna sosiologis yang dilekatkan pada objek atau simbol (Blumer, 1969). Dalam mengevaluasi Yansos Jejama, teori ini digunakan untuk membedah bagaimana penyandang disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual di Lampung Timur memaknai kehadiran tim medis, pembagian sembako, uang tunai, dan modal ekonomi mandiri. Makna subjektif ini menjadi indikator fundamental untuk menguji apakah program berhasil mengubah status sosial mereka menjadi mandiri dan produktif, atau justru melanggengkan dependensi (ketergantungan) sosial.

2. Komponen Kebijakan Yansos Jejama

Evaluasi Kebijakan dan Model Pelayanan

Evaluasi kebijakan dalam studi ini mengadopsi kriteria evaluasi performatif yang tidak sekadar melihat serapan anggaran, tetapi menekankan pada aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan inklusivitas (Subarsono, 2020). Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) dimaknai secara akademis sebagai model *active outreach* atau strategi intervensi proaktif berbasis komunitas.

Model "jemput bola" dengan mengintegrasikan tim kesehatan gabungan (dokter, psikolog, perawat), pekerja sosial, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan upaya memutus hambatan geografis

yang dialami disabilitas di pelosok pedesaan Lampung Timur. Evaluasi kebijakan diarahkan untuk menganalisis mengapa struktur jejaring ini mengalami reduksi fungsional akibat kontraksi anggaran pada periode 2023–2025, serta bagaimana fluktuasi fiskal tersebut memengaruhi kualitas intervensi rehabilitasi sosial di tingkat desa.

Kesejahteraan Sosial Kelompok Disabilitas

Kesejahteraan sosial bertransformasi dari konsep materialistis-parsial (sekadar pemberian bantuan sosial darurat) menjadi konsep multidimensional yang inklusif (Midgley, 2014; Suharto, 2018). Dalam konteks evaluasi Yansos Jejama, kesejahteraan sosial diukur melalui keberhasilan program dalam memenuhi hak dasar disabilitas secara holistik, meliputi:

- a. Dimensi Klinis-Rehabilitatif: Pemenuhan kebutuhan spesifik melalui pemeriksaan medis, stabilitas kesehatan, dan distribusi alat bantu fisik/sensorik.
- b. Dimensi Ekonomi-Eksistensial: Stimulan bantuan modal untuk mendorong kemandirian produktif agar subjek keluar dari siklus kemiskinan struktural.
- c. Dimensi Sosio-Kultural: Terpenuhinya kesamaan hak dan peluang berpartisipasi secara penuh dalam ruang publik tanpa diskriminasi.

3. Kontekstualisasi Penyandang Disabilitas dalam Ranah Sosiologis

Penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai objek medis yang cacat, melainkan sebagai subjek sosiologis yang mengalami hambatan akibat konstruksi lingkungan dan sikap diskriminatif masyarakat sekitarnya (Oliver, 2013). Penelitian ini memfokuskan kajian pada penyandang disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual sebagai kelompok yang mendominasi demografi PPKS di Kabupaten Lampung Timur. Melalui kerangka teoretis interaksionisme simbolik, kelompok disabilitas ini diposisikan sebagai relawan aktif yang mengonstruksikan makna "kesejahteraan" dan "martabat" berdasarkan kualitas intervensi sosial yang mereka terima melalui ekosistem jejaring Yansos Jejama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis ini berhasil memetakan realitas evaluatif program Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) di Desa Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, melalui pisau analisis Konstruksi Sosial dan Interaksionisme Simbolik. Berdasarkan hasil teknik *purposive sampling* terhadap 18 informan kunci serta observasi nonpartisipan di lapangan, ditemukan adanya diskoneksi struktural yang nyata antara idealisme regulasi makro (Perda Provinsi Lampung No. 7/2021) dengan realitas operasional program. Meskipun secara kuantitatif tata kelola jejaring (*network governance*) berhasil memobilisasi kekuatan 23 orang tim gabungan yang terdiri atas 10 personel birokrasi formal

(seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan relawan khusus) serta 13 relawan swadaya berbasis komunitas (kader PKK, Karang Taruna, dan komunitas kemanusiaan) untuk melayani 100 orang penerima manfaat, program ini menghadapi kelumpuhan stabilitas fiskal. Melalui kaca mata fase eksternalisasi dan objektivasi Berger dan Luckmann, pelebagaan program terbukti rapuh akibat kontraksi anggaran daerah yang ekstrem dari tahun ke tahun. Keterbatasan ruang fiskal ini memaksa terjadinya penyusutan lokus intervensi wilayah secara drastis, dari semula menjangkau 15 kabupaten pada tahun 2023, menyusut menjadi 6 kabupaten pada 2024, hingga dikunci hanya untuk 4 kabupaten saja pada tahun 2025/2026. Deskripsi tekstural dan struktural menyingkap terjadinya reduksi fungsional pelayanan di lapangan. Intervensi tim gabungan sepenuhnya didominasi oleh tindakan jangka pendek yang bersifat medis-karitatif (*medical-charity approach*), seperti pemeriksaan kesehatan instan serta pembagian logistik darurat berupa beras sembako, vitamin, obat-obatan, kursi roda, dan tongkat netra. Berdasarkan analisis makna Herbert Blumer, pemberian simbol-simbol material jangka pendek yang habis dalam waktu seminggu ini gagal membangun emansipasi ataupun kapasitas produktif subjek, melainkan justru melanggengkan dependensi (ketergantungan) sosial dan memosisikan kembali 100 orang sasaran termasuk di dalamnya 53 penyandang tuna daksa, 32 disabilitas sensorik, serta 15 pengasuh inti sebagai objek belas kasihan. Kondisi ini diperparah oleh kegagalan internalisasi nilai inklusi di tingkat desa akibat durasi interaksi tatap muka yang hanya berlangsung singkat dan bersifat seremonial. Melalui proses triangulasi sumber dan teknik, penelitian ini membuktikan terjadinya fenomena inklusi semu (*pseudo-inclusion*); pasca-kunjungan tim berlalu, penyandang disabilitas di Desa Labuhan Ratu nyatanya masih mengalami hambatan kultural yang tebal berupa stigma negatif, eksklusi dari kumpulan warga, serta ejekan fisik di lingkungan sosial mereka.

Pembahasan

Evaluasi Efektifitas Kebijakan Pelayanan Sosial Disabilitas Berbasis *Network Governance*

Program Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) secara yuridis didesain untuk mengoperasionalkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan studi dokumentasi terhadap dokumen regulasi dan arsip internal Dinas Sosial, program ini diarahkan sebagai model intervensi proaktif (*active outreach*) "jemput bola" guna memitigasi hambatan spasial penyandang disabilitas di pedesaan pedalaman yang mengalami hambatan mobilitas dan akses geografis menuju pusat pelayanan perkotaan.

Dalam pelaksanaannya di Desa Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, mobilisasi sumber daya manusia pelaksana melibatkan tim lintas sektor yang secara kuantitatif digambarkan dalam bagan alur hubungan fasilitator dan penerima fasilitas. Mobilisasi dan distribusi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) di Desa Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, secara terstruktur melibatkan dua rumpun fasilitator utama dengan total kekuatan 23 orang tim gabungan. Rumpun pertama digerakkan oleh otoritas birokrasi formal, yaitu Dinas

Sosial Provinsi Lampung yang mendelegasikan 10 orang personel ahli. Komposisi tim dinas ini didesain spesifik untuk melakukan intervensi klinis dan sosial dasar yang terdiri dari 1 orang ahli gizi, 1 orang dokter, 1 orang perawat, serta didukung oleh 7 orang relawan sosial khusus. Rumpun kedua bertumpu pada perluasan jejaring sosial berbasis komunitas yang merangkul 13 orang relawan sosial masyarakat. Sektor swadaya lokal ini memobilisasi 2 orang kader PKK, 5 orang anggota Karang Taruna, 3 orang relawan sosial lokal, dan 3 orang anggota komunitas kemanusiaan yang berfungsi sebagai motor penggerak di tingkat desa.

Seluruh instrumen fasilitator lintas sektor tersebut berkolaborasi untuk mengeksekusi strategi intervensi lapangan melalui model pelayanan proaktif yang dikenal dengan istilah "jemput bola". Strategi intervensi ini diarahkan langsung kepada klaster kelompok sasaran yang secara kuantitatif mencakup 100 orang penerima manfaat. Demografi penerima pelayanan di Desa Labuhan Ratu ini didominasi oleh kelompok disabilitas fisik, yaitu sebanyak 53 orang penyandang tuna daksa. Selebihnya, intervensi menysasar 32 orang penyandang disabilitas sensorik yang melingkupi penyandang tuna rungu, tuna netra, dan tuna wicara. Sebagai penguat ekosistem inklusi di tingkat domestik, struktur pelayanan ini juga mengintegrasikan 15 orang anggota keluarga atau pengasuh inti yang bertanggung jawab penuh atas pola pengasuhan harian para penyandang disabilitas tersebut.

Hasil observasi nonpartisipan terhadap aktivitas tim gabungan seolah menunjukkan berjalannya fungsi-fungsi pelayanan secara komprehensif. Peneliti mengamati proses intervensi lapangan yang meliputi pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter dan perawat, distribusi logistik berupa obat-obatan dan vitamin oleh ahli gizi, pemberian paket sembako, serta penyerahan alat bantu fisik berupa tongkat netra, kursi roda, dan alat bantu dengar. Seluruh rangkaian aktivitas teknis ini dicatat secara kronologis dalam buku catatan lapangan (*field notes*) sebagai wujud objektivasi program di tingkat akar rumput.

Melalui analisis model interaktif Miles dan Huberman, data verbal hasil wawancara semiterstruktur ditranskripsikan secara *verbatim* dan diseleksi menggunakan tiga pengodean (*coding*) utama untuk memetakan realitas evaluatif yang sesungguhnya di lapangan. Menemukan kenyataan berupa kontraksi anggaran daerah secara masif dari tahun ke tahun yang berdampak langsung pada penyusutan lokus intervensi (dari 15 kabupaten pada 2023 menjadi hanya 4 kabupaten pada 2025), Menunjukkan bahwa aktivitas pelayanan gabungan di lapangan mengalami reduksi fungsional, di mana tim hanya berfokus pada tindakan jangka pendek yang bersifat medis-karitatif (*medical-charity approach*) dan Mengungkapkan eksistensi hambatan kultural, pengucilan, dan diskriminasi fisik yang masih dialami oleh para penyandang disabilitas di lingkungan sosial Desa Labuhan Ratu pasca-intervensi program.

Penilaian objektif terhadap implementasi Yansos Jejama menepis klaim birokrasi yang menyebut program ini sebagai terobosan mutlak yang berhasil. Studi ini menemukan adanya kerapuhan struktural yang bersumber dari ketidakpastian ruang anggaran daerah. Ketika Perda Nomor 7 Tahun 2021 secara normatif mengamanatkan perluasan pemenuhan hak disabilitas secara merata, kapasitas finansial daerah justru mengalami kontraksi linear. Kesenjangan (*gap*) yuridis-fiskal ini diakui secara terbuka oleh Informan Kunci

Ibu Lusita, S.E (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung):

“Program Yansos Jejama ini sebenarnya konsepnya ideal, tapi kami terbentur rasionalisasi anggaran yang sangat ekstrem. Tahun 2023 kami bisa menyasar 15 kabupaten, tapi di 2024 menyusut menjadi 6, dan tahun 2025 ini anggaran kami dikunci hanya untuk 4 kabupaten, termasuk Lampung Timur. Bahkan untuk Pringsewu anggarannya belum bisa cair. Akibatnya, tim lapangan bergerak dengan logistik yang sangat terbatas dan jangkauannya tidak bisa merata.” (Wawancara, 12 Maret 2025).

Melalui kacamata Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, fase *eksternalisasi* kebijakan yang diproduksi oleh institusi birokrasi tidak mengalami pelembagaan (*institusionalisasi*) yang kokoh pada fase *objektivasi*. Ketika kebijakan diturunkan ke level operasional di Desa Labuhan Ratu, jejaring sosial yang melibatkan Karang Taruna (5 orang) dan Komunitas Kemanusiaan (3 orang) dipaksa membatasi ruang gerak akibat ketiadaan jaminan fiskal daerah. Temuan ini berdialog dan memperkuat analisis Subarsono (2020) yang menegaskan bahwa *network governance* di tingkat lokal sering kali terjebak dalam disfungsi manajerial akibat ketiadaan komitmen *fiscal sustainability* jangka panjang dari pemerintah daerah. Akibatnya, keberadaan program ini di Lampung Timur bukan mencerminkan perluasan inklusi, melainkan bentuk rasionalisasi birokratis yang diskriminatif karena mengorbankan hak wilayah lain (seperti Kabupaten Pringsewu yang anggarannya tidak terealisasi).

Berdasarkan hasil observasi nonpartisipan peneliti, wujud intervensi 10 orang tim Dinas Sosial (termasuk dokter dan perawat) sepenuhnya didominasi oleh pemberian santunan dan tindakan medis instan. Reduksi manfaat dari pemberdayaan menjadi sekadar pelayanan karitatif ini dikeluhkan secara kritis oleh salah satu perwakilan keluarga disabilitas, Informan Penerima Manfaat (Pengasuh Anak Tuna Daksa di Desa Labuhan Ratu):

“Memang waktu tim Yansos datang, anak saya diperiksa dokter dan dikasih vitamin serta beras sembako. Kami berterima kasih. Tapi kalau dibilang ada bantuan modal usaha atau pelatihan itu tidak ada sama sekali buat kami. Setelah tim pulang, ya kami kembali seperti biasa, kesulitan biaya terapi harian anak saya karena suami kerja serabutan. Bantuan itu habis dalam seminggu.” (Wawancara, 5 April 2026).

Keterbatasan intervensi ini dianalisis menggunakan teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang mereka berikan pada simbol di sekitarnya. Ketika 100 orang penyandang disabilitas (termasuk 53 tuna daksa dan 32 disabilitas sensorik) secara konsisten hanya menerima simbol material jangka pendek berupa paket sembako, kursi roda, atau obat-obatan gratis, maka dalam ruang kognitif mereka, Yansos Jejama dimaknai bukan sebagai ruang emansipasi atau peningkatan kapasitas (*capacity building*), melainkan sebagai program filantropi musiman yang melanggengkan posisi mereka sebagai objek belas kasihan (*dependensi sosial*). Temuan kritis ini sejalan dengan kritik sosiologis Oliver (2013) dalam *social model of disability* yang menyatakan bahwa kebijakan pelayanan sosial bagi kelompok rentan akan mengalami kegagalan struktural jika hanya memperlakukan disabilitas sebagai entitas biologis yang sakit (*medical model*) tanpa membongkar hambatan ekonomi

produktif yang mengurung mereka dalam siklus kemiskinan.

Klaim normatif yang menyatakan bahwa keterlibatan kader PKK, Karang Taruna, dan relawan lokal secara otomatis mampu mereduksi stigma negatif di pedesaan terbukti keliru. Hasil penelitian mengungkap bahwa struktur jejaring sosial yang dibentuk oleh program ini bersifat temporal dan tidak memiliki akar sosiologis yang kuat untuk mendekonstruksi bias budaya masyarakat lokal. Proses *internalisasi* nilai inklusi di tengah masyarakat Desa Labuhan Ratu tidak terjadi karena interaksi tatap muka yang dilakukan oleh pelaksana program hanya berlangsung dalam durasi yang sangat singkat (seremonial kunjungan lapangan). Hal ini terkonfirmasi dari penuturan Informan Penerima Manfaat (Penyandang Disabilitas Sensorik Netra):

“Program Yansos Jejama itu kan cuma sehari dua hari di desa. Setelah mereka pulang, perlakuan orang-orang di kampung tetap sama. Kami masih dianggap remeh, dianggap tidak bisa kerja apa-apa. Kalau ada acara desa atau kumpulan warga, kami hampir tidak pernah diajak bicara atau dilibatkan. Anak-anak disabilitas di sini masih sering diejek secara fisik oleh tetangga.” (Wawancara, 18 April 2026).

Kutipan *verbatim* tersebut mengonfirmasi bahwa ekosistem inklusif yang diklaim oleh pemerintah daerah hanyalah sebuah konstruksi semu (*pseudo-inclusion*). Masyarakat lokal masih mengonstruksikan tubuh disabilitas sebagai simbol ketidaksempurnaan dan beban sosial. Hambatan kultural berupa ejekan fisik dan eksklusi dari aktivitas sosial desa menunjukkan bahwa kehadiran 23 orang tim gabungan fasilitator belum mampu mengintervensi ranah kesadaran publik. Studi ini memperkuat tesis sosiologis Suharto (2018) yang menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial berbasis komunitas akan terjebak menjadi rutinitas administratif birokrasi belaka apabila mengabaikan aspek reformasi kultural di tingkat lokal. Jejaring sosial dalam program Yansos Jejama di Lampung Timur baru berfungsi pada tataran mekanis-logistik (distribusi bantuan fisik), namun gagal total bertransformasi menjadi instrumen advokasi sosial-budaya yang mampu menghentikan diskriminasi harian terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, hubungan antara jejaring sosial, pelayanan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masih terputus oleh tembok tebal stigma struktural yang belum terpecahkan oleh kebijakan ini.

SIMPULAN

Evaluasi terhadap Kebijakan Program Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) di Desa Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, menunjukkan adanya diskoneksi struktural antara idealisme regulasi makro (Perda Nomor 7 Tahun 2021) dan realitas operasional. Meskipun program ini berhasil memobilisasi tata kelola jejaring lintas sektor (*network governance*) yang melibatkan 23 orang fasilitator gabungan untuk menjangkau 100 penerima manfaat secara proaktif, keberlanjutannya rapuh akibat kontraksi fiskal linear dari tahun ke tahun. Pemangkasan anggaran yang ekstrem memaksa terjadinya penciutan lokus intervensi daerah dari 15 kabupaten menjadi hanya 4 kabupaten pada tahun 2026.

Secara sosiologis, intervensi Yansos Jejama mengalami reduksi fungsional karena terjebak pada pendekatan medis-karitatif (*medical-charity approach*) jangka pendek, berupa bagi-bagi sembako, obat-

obatan, dan alat bantu instan. Berdasarkan analisis interaksionisme simbolik, dominasi simbol bantuan material musiman ini justru melanggengkan dependensi sosial kelompok disabilitas sebagai objek santunan, alih-alih membangun kapasitas kemandirian ekonomi. Lebih jauh, program yang bersifat temporal ini gagal mengintervensi ranah kesadaran kultural publik, sehingga menciptakan inklusi semu (*pseudo-inclusion*). Pasca-kunjungan tim, para penyandang disabilitas terbukti masih membentur tembok tebal stigma struktural, pengucilan sosial, serta diskriminasi fisik di tengah masyarakat lokal.

1. Kontribusi Ilmiah (*Scholarly Contribution*)

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam studi evaluasi kebijakan sosiologis, khususnya pada literatur pelayanan kelompok rentan berbasis komunitas di negara berkembang. Melalui integrasi paradigma Konstruksi Sosial Berger-Luckmann dan Interaksionisme Simbolik Blumer, penelitian ini berhasil mendekonstruksi klaim-klaim keberhasilan administratif sepihak (*overclaim*) yang lazim diproduksi oleh birokrasi pemerintahan daerah. Studi ini menawarkan model analisis kritis yang membuktikan bahwa efektivitas *network governance* tidak cukup diukur dari tercapainya *output* logistik lapangan (distribusi barang), melainkan harus menyentuh perubahan dunia makna dan dekonstruksi stigma kultural pada tingkat mikro-interaksional masyarakat.

2. Keterbatasan Penelitian (*Research Limitations*)

Peneliti menyadari bahwa studi evaluatif ini memiliki beberapa keterbatasan spasial dan metodologis:

- a. Keterbatasan Lokus dan Sifat Data: Lokus penelitian dibatasi hanya pada satu wilayah kritis di tingkat pedesaan, yaitu Desa Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, sehingga dinamika struktural yang ditemukan belum tentu dapat digeneralisasikan secara mutlak untuk wilayah perkotaan besar di Provinsi Lampung.
- b. Ketiadaan Data Longitudinal: Akibat keterbatasan waktu dan absennya basis data digital yang terintegrasi pada instansi terkait, penelitian ini belum mampu menyajikan data pelacakan longitudinal (jangka panjang) mengenai fluktuasi kondisi psikososial dan ekonomi penerima manfaat setelah bertahun-tahun program meninggalkan lokasi intervensi.

3. Agenda Riset Lanjutan (*Future Research Agenda*)

Berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan di atas, agenda riset mendatang yang direkomendasikan adalah:

- a. Studi Komparatif Makro-Mikro: Perlu dilakukan penelitian komparatif yang membandingkan efektivitas tata kelola jejaring pelayanan disabilitas antara wilayah pedesaan (yang minim infrastruktur) dengan wilayah perkotaan (yang memiliki aksesibilitas lebih baik) di Provinsi Lampung.
- b. Analisis Kebijakan Ekonomi Politik: Diperlukan riset lanjutan yang berfokus pada analisis ekonomi politik anggaran daerah (*fiscal policy study*) untuk merumuskan model pembiayaan inovatif yang menjamin keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) bagi program inklusi sosial, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada fluktuasi APBD konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjuna, A., Dedi, S., & Bin Ridwan, R. (2025). *Pelecehan Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Edy, T. P., & Alfian, A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pemerintah Daerah Lampung). *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(02), 119-128.
- Herbowo, H. D. (2025). Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak dalam Konteks Kebijakan Sosial: Antara Pendekatan Kesejahteraan, Hak Anak, dan Partisipasi: Reconceptualizing Child Welfare in the Context of Social Policy: Between Welfare, Children's Rights, and Participation Approaches. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 353-371.
- Hidayat, A. (2022). Evaluasi program kesejahteraan sosial berbasis komunitas: Tantangan keberlanjutan di tengah keterbatasan ruang fiskal. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 145-158.
- Irfan, R., & Khuluqi, S. (2024). Analisis Metode Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an: Kajian QS. Hud Ayat 61-68. *Jurnal Keislaman*, 7(2), 534-551.
- Kurniawan, R., & Saputra, D. (2024). Kerapuhan manajerial dan tantangan tata kelola pelayanan publik di tingkat daerah. *Jurnal Administrativa*, 6(1), 34-47.
- Merakati, I., Lieung, K. W., Hanipah, S., Widyastuti, S. R., Arif, A., Asiyah, B., ... & Arifiana, I. Y. (2025). *Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Indonesia*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Midgley, J. (2014). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Evaluasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Kebijakan Model Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Novita, A. A. A., (2025). *Governance for sustainable development*. Selaras Media Kreasindo.
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Oliver, M. (2013). The Social Model of Disability: Thirty Years On. *Disability & Society*, 28(7), 1024-1026. <https://doi.org/10.1080/09687599.2013.818773>
- Oliver, M., & Barnes, C. (2020). Disability and social policy: From formalistic administration to substantive human rights. *Disability & Society*, 35(4), 521-539.
- Pratama, I. (2021). Efektivitas bantuan materiil parsial dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas: Evaluasi pasca-pandemi. *Policy & Governance Review*, 5(3), 210-225.
- Rahmawati, S. (2023). Intersectional vulnerability: Membedah modal sosial dan kerentanan kelompok disabilitas di tingkat lokal. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 28(1), 78-95.
- Radianto, W. E. D., Murwani, F. D., Wono, H. Y., Kom, S. I., & Kom, M. M. (2025). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Prenada Media.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.
- Ritzer, G. (2019). *Sociological Theory* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Subarsono, A. G. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2018). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Alfabeta.
- Suryono, B., & Handayani, T. (2022). Akuntabilitas administratif vs responsivitas kebijakan: Evaluasi

kuantitatif pelayanan disabilitas daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(2), 112–126.

Wahyudi, F. (2023). Konstruksi sosial kearifan lokal Jejama sebagai instrumen perlindungan sosial masyarakat inklusif. *Jurnal Sosiologi: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 167–182.